

Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Moh Zidna Faojan Adima
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
gmohzidna@gmail.com

Abstract

Socialization is the most important process that we consciously or unconsciously live in our daily lives. Education policy is very important related to the morals of students. Aims to find out how to socialize education policy; knowing the stages of education policy socialization; know the strategy of education policy socialization; and know the socialization of education policy. This research was carried out with a qualitative descriptive approach seen from the point of view of Education Policy Socialization, an approach that was in accordance with the circumstances found. The results of this study indicate that; There are several stages that need to be considered in the educational policy socialization process, namely: 1) the preparation stage (preparatory stage), the implementation stage (play stage), and 3) the action stage (game stage). Education policies that have been formulated can be disseminated using various media, both in the form of communication media such as posters, brochures, banners, and billboards, as well as through electronic media, such as optical discs (compact disks or DVDs), social media, internet, radio and television. .

Keywords: *Socialization, policy, education*

Abstrak

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak kita sudah jalani dalam kesehariannya. Kebijakan pendidikan menjadi sangat penting terkait dengan moral anak didik. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi kebijakan pendidikan; mengetahui tahapan sosialisasi kebijakan pendidikan; mengetahui strategi sosialisasi kebijakan pendidikan; dan mengetahui media sosialisasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif dilihat melalui sudut pandang tentang Sosialisasi Kebijakan Pendidikan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sesuai dengan keadaan aslinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Ada beberapa tahapan-tahapan yang diperlukan diperhatikan dalam proses sosialisasi kebijakan pendidikan, yaitu: 1) tahap persiapan (preparatory stage), tahap meniru (play stage), dan 3) tahap tindakan (game stage). Kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan

berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, leaflet brosur, spanduk, dan baliho, maupun melalui media elektronik, seperti cakram optik (compact disk atau DVD), media sosial, internet, radio dan televisi.

Kata kunci: Sosialisasi, kebijakan, pendidikan

PENDAHULUAN

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak kita sudah jalani dalam kesehariannya. Sosialisasi juga menjadi suatu kegiatan di mana seorang diberikan pelajaran menjadi manusia yang berkontribusi dalam masyarakat maupun organisasi atau tempat kerjanya. Biasanya berbagai permasalahan seputar sosialisasi kebijakan, belum di ketahuinya aturan, prosedur, tanggung jawab, batasan, koordinasi, tindakan yang tepat belum diketahui masyarakat. Untuk mengatasi agar tidak terjadi miskomunikasi, kesalahan intepretasi, pada hakikatnya sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas sumber daya pendukung yang jelas pula.

Kebijakan pendidikan menjadi sangat penting terkait dengan moral anak didik. Kebijakan pendidikan mencakup seperangkat ketetapan, peraturan mengenai pendidikan yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dengan latar belakang masyarakat yang diawali dengan perumusan, penetapan, implementasi hingga pada evaluasi. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa Undang-Undang pendidikan, intruksi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan.

METODE

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengambilan

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011, hlm.9).

TEMUAN & DISKUSI

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak kita sudah jalani dalam kesehariannya. Sosialisasi adalah penyampaian informasi secara terbuka berupa (peraturan, program, keputusan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat luas) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap, perilaku masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kritis.

Effendy (1999) yang mengemukakan sosialisasi sebagai penyediaan berbagai sumber pengetahuan yang memungkinkan orang untuk bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif dan sadar akan fungsi sosialnya, sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.

Jadi dalam konteks kebijakan, menurut Harton dan Hunt (1989-1989) sosialisasi pada prinsipnya adalah sistem agar suatu keputusan dapat mencapai tujuannya. Suatu program kebijakan disosialisasikan agar mempunyai tujuan atau efek yang diinginkan. Sosialisasi dipandang sebagai proses interaksi antara satu perangkat pelaksana, tindakan dan tujuan yang dapat mencapai sasaran kebijakan, dimana di dalam sosialisasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik di pakai secara bersama.

Definisi kebijakan pendidikan sebagaimana adanya dapat disimak melalui pernyataan-pernyataan berikut ini. "Carter V. Good (1959) menyatakan, *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized education as a*

general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives.”

Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan factor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.

Sosialisasi kebijakan pendidikan menjadi sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan pendidikan kepada publik. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sedangkan kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat dan menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan.

Hasil penelitian dalam jurnal berjudul “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi*” menunjukkan bahwa pada sisi komunikasi aspek transmisi dinilai kurang baik, aspek kejelasan juga kurang baik, sedang aspek konsistensi dinilai cukup baik. Oleh karena itu dapat dipahami jika masih terjadi kesenjangan implementasi kebijakan pendidikan inklusi di kota Salatiga. Hal ini dapat dipahami dari teori Edward III (Winarno, 2011: 181) yang menyatakan bahwa “...semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka makin tinggi pula probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan”

Dalam jurnal yang berjudul *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman* memberikan saran berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan gratis, diperlukan komunikasi kebijakan yang lebih baik untuk menginformasikan pelaksanaan pendidikan gratis kepada

masyarakat sasaran. Agar pelaksanaan pendidikan gratis dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, pelanggaran kesalahpahaman terhadap kebijakan dapat dihindarkan.

Diperlukan komunikasi kebijakan yang lebih berorientasi kepada masyarakat dengan bekerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat agar pelaksanaan pendidikan gratis dapat terlaksana dengan lebih merata. Diperlukan pengawasan yang lebih baik untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan gratis, agar dalam pelaksana pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman tidak ditemukan pelanggaran oleh sekolah maupun pihak lain.

Diperlukan sanksi yang jelas untuk pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pendidikan gratis. Diperlukan kejelasan dalam prosedur (SOP) pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman agar pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman lebih jelas dan transparan. Kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat agar pelaksanaan pendidikan gratis dapat terlaksana dengan lebih merata. Diperlukan alternatif kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan gratis hingga ke tingkat SMA. Kebijakan pendidikan gratis saat ini tidak lagi sampai ke tingkat Sekolah Menengah dikarenakan pemindahan kewenangan pelaksanaan pendidikan ke provinsi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan yang dapat menjadi landasan untuk pelaksanaan pendidikan gratis hingga ke sekolah menengah.

Sosialisasi aktif yang dilakukan orangtua didalam penelitian ini adalah aktif dalam mengarahkan anak-anaknya kepada kehidupan yang sesungguhnya. Orangtua yang tinggal dipermukiman cenderung melakukan sosialisasi aktif dengan cara menuntun anak untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi norma di lingkungan masyarakat. Keluarga yang tinggal dipermukiman maupun yang tinggal di perkampungan termasuk dalam kategori pernah, sering dan bahkan cenderung selalu melakukan

fungsi sosialisasi secara aktif dalam menjelaskan arti dari setiap yang ingin di ketahui oleh anak-anak mereka.

Kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan perumusan kebijakan pendidikan, legitimasi pendidikan, komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, mengupayakan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Proses sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasikan atau disebut juga dengan aktifitas melaksanakan sosialisasi dan pihak kedua adalah pihak yang disosialisasikan atau yang menerima sosialisasi. Beberapa tahapan sosialisasi kebijakan pendidikan antara lain :

1. Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dipersiapkan sejak rencana kebijakan pendidikan digulirkan, seorang pimpinan mempersiapkan draft aturan, regulasi maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan. Pada tahap ini juga stakeholder sudah mulai mencerna dan memahami kenapa, manfaatnya dan dampaknya sudah ada dalam pikirannya meski belum sempurna. Dalam tahap ini, setiap individu sebagai anggota masyarakat mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan, serta memahami dan membekali dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam kebijakan tersebut, sehingga proses penerimaan produk kebijakan bisa dengan mulus karena sudah berkesesuaian dengan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan tersebut.

2. Tahap Meniru (*Play Stage*)

Tahap meniru dicirikan dengan semakin membaiknya masyarakat mengikut kebijakan yang akan ditetapkan, termasuk menyesuaikan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh orang dewasa. Pada tahap meniru ini mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan baru. Masyarakat mulai

menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut, atau masyarakat memiliki kemampuan untuk memposisikan diri pada kebijakan yang akan disahkan serta mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran kolektif dari masyarakat mulai terbentuk sempurna sesuai dengan harapan dalam kebijakan.

3. Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*)

Tahapan adaptation yang dilaksanakan tidak menjadi utama lagi mulai berkurang, dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri menjadi kepribadian dan budaya dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi yang diharapkan mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan adanya kemampuan beraktivitas secara bersama-sama dengan sempurna. Pada tahap ini masing-masing orang merasa puas, mereka saling memberi tahu koleganya, dan mulai memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama masyarakat mulai memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya (*awareness*).

Dalam jurnal *Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros* dalam merealisasikan merdeka belajar, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua metode utama. Pertama, metode ceramah sosialisasi. Metode ceramah digunakan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada guru tentang kebijakan Kemendikbud 2020 yaitu program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan tanggal 25 Agustus 2020 dengan media Zoom Meeting. Pada saat usulan pengabdian diajukan, tim pengabdian berencana untuk datang langsung ke sekolah mitra di Kabupaten Maros. Namun, sejak bulan Maret 2020 pandemi covid-19 menyerang dan berakibat pada pembatasan pertemuan dan transportasi, maka agar tujuan pengabdian tetap tercapai dilakukan melalui daring Zoom. Kedua, metode tanya jawab. Metode tanya

jawab digunakan untuk memberikan kesempatan pada guru-guru selaku hadirin yang masih belum merasa jelas dan masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam kegiatan ceramah di awal. Metode-metode di atas digunakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal dalam rangka memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas guru SMPN 2 Maros dalam melaksanakan program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak.

Kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, *leaflet* brosur, spanduk, dan baliho, maupun melalui media elektronik, seperti cakram optik (*compact disk* atau *DVD*), internet, radio dan televisi.

Leaflet merupakan sehelai kertas dari bahan agak kaku yang mudah dilipat sebagai sarana untuk menginformasi dan mengkomunikasikan produk kebijakan dari suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan. *Leaflet* disebarakan kepada target melalui penempatan *leaflet* di tempat strategis, atau dibagikan pada suatu *event* tertentu. *Leaflet* bersifat praktis, mudah dibawa, mudah disimpan dan mudah dibaca dimanapun dalam waktu lama. *Leaflet* digunakan untuk mengingat kembali tentang hal-hal yang telah pernah dikomunikasikan atau untuk memperkenalkan kebijakan baru/prosedur (proses) baru kepada orang banyak. *Leaflet* juga dapat diletakkan di loket-loket layanan publik agar masyarakat mengetahui kebijakan atau prosedur ringkas untuk mengurus sesuatu, misalnya untuk kebijakan bayar SPP sertifikasi dosen, mengajukan izin pembukaan kursus atau lembaga pelatihan, mengajukan dana bantuan operasional sekolah, dan sebagainya.

Sosialisasi kebijakan pendidikan bisa menggunakan media poster, yang berbeda dengan media komunikasi lainnya yakni poster harus dapat lihat oleh orang yang melewati dimana poster itu diletakkan sedangkan brosur, *booklet*

dirancang untuk dibaca secara khusus, sambil duduk atau diam sesaat sambil berdiri. Oleh karena itu poster harus dapat menarik perhatian pembacanya seketika, dan dalam hitungan detik, pesannya harus dimengerti. Dalam sosialisasi kebijakan pendidikan, poster dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, antara lain untuk mencapai tujuan: 1) memperkenalkan rangkaian kebijakan dan manfaatnya, 2) memperkenalkan prosedur terkait dengan kebijakan tersebut; 3) memberikan penawaran tertentu, seperti beasiswa serta prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; 4) membentuk sikap atau pandangan (propaganda) tertentu, seperti budaya kerja baru yang melekat pada kebijakan tersebut.

Billboard menjadi sarana sosialisasi kebijakan pendidikan yang berukuran besar, di tempat tertentu yang tinggi dan ramai dilalui orang. *Billboard* termasuk media yang sangat populer dan banyak digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan pada pelanggan. Perkembangannya pun cukup pesat. Sekarang di jaman digital, *billboard* pun menggunakan teknologi baru sehingga muncullah *digital billboard*. Ada juga *mobile billboard*, yaitu *billboard* yang berjalan ke sana ke mari karena dipasang di mobil iklan berjalan. *Mobile billboard* sendiri sekarang sudah ada yang *digital mobile billboard*. *Billboard* berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*, kain, kaca, plastik, dan sebagainya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap, dan reklame tersebut bersifat permanen. Contoh penggunaan *Billboard* untuk sosialisasi beasiswa di kampus kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang ada di kampusnya, sehingga menarik banyak peminat kuliah di kampus tersebut.

Selain *billboard* di Indonesia juga dikenal baliho. Perbedaannya terletak pada permanen atau tidaknya tempat *billboard* itu berdiri. Jika tempatnya (konstruksinya) sementara atau semi permanen maka *billboard* tersebut disebut

baliho. Baliho bahannya bisa berupa kayu, logam, kain, *fiberglass* dan sebagainya. Isinya merupakan informasi jangka pendek mengenai acara (*event*) tertentu atau kegiatan yang bersifat insidental.

Sesuai dinamika perkembangan teknologi dibidang internet, maka sosialisasi kebijakan pendidikan yang paling efisien dan efektif serta ekonomis dilakukan melalui media sosial, misalnya instagram, facebook, twitter, instagram, whatsapp group, line dan lain-lainnya. Bahkan secara massal bisa dilakukan melalui media TV, Koran, radio, Sedangkan melalui pertemuan tatap muka bisa dilakukan melalui Forum Diskusi Group (FGD), rapat sosialisasi, rapat pimpinan dan lainnya yang dianggap forum sosialisasi kebijakan pendidikan.

Dalam penelitian yang berjudul *Efektivitas Penggunaan Media Dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Human Trafficking Di Kabupaten Indramayu*, efektivitas penggunaan media dalam sosialisasi penanganan human trafficking dilihat dari persepsi responden terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu persepsi terhadap intensitas penggunaan media, persepsi terhadap isi media, dan persepsi terhadap daya Tarik media. Temuan kedua berkenaan dengan persepsi responden terhadap isi media, yang dilihat dari kesesuaian isi media, kejelasan informasi, dan aktualitas informasi, juga masih belum optimal. Temuan ketiga berkenaan dengan persepsi responden terhadap daya tarik media, yang dilihat dari daya tarik isi media dan daya tarik jenis media, sudah cukup baik.

Berdasarkan temuan-temuan lapangan dapat dikatakan bahwa secara umum, di wilayah Kabupaten Indramayu penggunaan media dalam sosialisasi kebijakan penanganan human trafficking masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Intensitas penggunaan media harus lebih ditingkatkan dengan menyusun skala prioritas penggunaan media yang lebih intensif dan mempertimbangkan penggunaan media yang mampu menjangkau khalayak

yang lebih luas dan media yang banyak digunakan masyarakat di Indramayu. Isi media juga harus disajikan dengan melihat kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi yang disajikan. Selain itu, isi media harus disesuaikan dengan karakteristik media yang digunakan dan harus selalu diperiksa berkenaan dengan aktualitas informasinya. Hal ini penting mengingat masyarakat sebagai kelompok sasaran membutuhkan informasi yang akurat dan cukup komprehensif, yang disampaikan oleh sumber-sumber yang menurut mereka bisa dipercaya dan memahami apa yang disampaikannya.

KESIMPULAN

Sosialisasi adalah sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. Sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah, sehingga tercipta kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat. Ada beberapa tahapan-tahapan yang diperlukan diperhatikan dalam proses sosialisasi kebijakan pendidikan, yaitu: 1) tahap persiapan (preparatory stage), tahap meniru (play stage), dan 3) tahap tindakan (game stage). Kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, leaflet brosur, spanduk, dan baliho, maupun melalui media elektronik, seperti cakram optik (compact disk atau DVD), media sosial, internet, radio dan televisi.

REFERENSI

- PNPM Mandiri Perkotaan. (2009). *Sosialisasi.htm* (<http://www.P2Kp.org/about.asp>), diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.
- Effendy, Onong Uchyana. (1999). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arwildayanto, dkk. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Ali Imron, (2000). *Kebijaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara. Hlm. 18
- Sasadara, dkk. (2017). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi*. Jurnal Manajemen Pendidikan. Volume: 4, No. 2.
- Aisyah, dkk., (2017). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman*. Journal of Public Sector Innovations, Vol. 2, No. 1.
- A.Sari,dkk., (2010). Pengaruh Pola Komunikasi Keluarga dalam Fungsi Sosialisasi Keluarga terhadap Perkembangan Anak, Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 08, No.2
- Wen Yusri, dkk. (2015). *Analisis Kebijakan Pendidikan Keluarga Dalam Memantapkan Perilaku Moral Anak Di Kabupaten Aceh Tengah*. Jurnal Administrasi Pendidikan. Volume 3, No. 2.
- Nisa dan Kharisma, (2018). *Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Pelajar Mengenai Hoax*, Channel, Vol. 6, No. 1.
- Atika Wijaya dkk, (2020). Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak, Jurnal Puruhita Vol. 2(1).
- Slamet dan Meria, (2016). *Efektivitas Penggunaan Media Dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Human Traffickingdi Kabupaten Indramayu*, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi.